

KINERJA MUSRENBANG PROVINSI LAMPUNG 2017

PERFORMANCE OF MUSRENBANG PROVINCE LAMPUNG 2017

Ridwan Saifuddin¹, Dedy Hermawan², Sigit Prasetyo²

¹Peneliti Balitbangda Provinsi Lampung

²Dosen FISIP Universitas Lampung

Dikirim 22 Februari 2018 Direvisi 16 Maret 2018 Disetujui 26 Maret 2018

Abstrak : Musrenbang merupakan langkah awal proses pembangunan yang darinya diharapkan lahir keselarasan arah dan prioritas program, sehingga proses pembangunan pusat dan daerah sinergi dan terintegrasi. Kajian ini mengidentifikasi dan membandingkan program prioritas nasional dan Provinsi Lampung, yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung 2017. Juga, dokumen perencanaan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Provinsi Lampung (RPJMD) 2015-2019. Hasil identifikasi, dari 88 indikator sasaran yang berkaitan dengan daerah, terdapat 79 indikator yang telah diwujudkan Provinsi Lampung, atau dengan kata lain, tingkat kesesuaian program sebesar 88,76%, yang menurut Skala Nilai Peringkat Kinerja dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk dalam rentang berkategori tinggi.

Kata kunci: *Musrenbang, program, prioritas, kinerja.*

Abstract : *Musrenbang is the first step of the development process which is expected to be born in harmony of direction and priority of the program, so that the central and regional development process is synergy and integrated. This study identifies and compares the national priorities program and Lampung Province, as stated in the Government Work Plan (RKP) and Regional Government Work Plan (RKPD) of Lampung Province 2017. Also, the national medium-term planning document (RPJMN) and Lampung Province (RPJMD) 2015-2019. The results of identification, from 88 indicators related to the target area, there are 79 indicators that have been realized Lampung Province, or in other words, the level of suitability of the program of 88.76%, which according to Performance Rating Scale of the Ministry of Internal Affairs, included in the category of high.*

Keywords: *Musrenbang, program, priority, performance.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan partisipatif merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan asas pokok demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan pada setiap tingkatan. Partisipasi yang baik harus dibangun sejak awal proses perencanaan pembangunan.

Karena pentingnya partisipasi masyarakat, pemerintah diharuskan dalam perencanaan pembangunan melalui tahap musyawarah secara berjenjang (*bottom up*), yang diformulasikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai tingkat desa,

kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Tujuannya mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai amanat undang-undang. Dari aspek kebijakan publik, proses perencanaan meliputi empat tahapan, yaitu perumusan masalah, perumusan agenda, perumusan usulan, dan pengesahan usulan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, disebutkan bahwa salah satu tahapan penyusunan RKPD adalah pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Beberapa masalah yang acap terjadi dalam Musrenbang, diantaranya, tidak semua aspirasi masyarakat terakomodir. Ini terjadi karena kapasitas fiskal terbatas.

Kapasitas anggaran memang krusial, disamping efektivitas atau ketepatan alokasi dan akuntabilitasnya.

Secara umum, permasalahan yang sering muncul dalam Musrenbang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berkaitan dengan input, proses, dan output. Masalah terkait input, terutama menyangkut (kualitas) keterlibatan masyarakat yang rendah, sebagai dampak ketidapahaman tentang makna partisipasi dalam pembuatan kebijakan, kurangnya informasi, serta masih kuatnya paternalisme. Berkait dengan proses, masih kuatnya budaya kekuasaan (*top down*), sehingga partisipasi cenderung semu, sekadar memenuhi prosedur (formalitas). Masalah output, berkaitan masih kuatnya paradigma lama: merencanakan adalah menyusun *shopping list* tanpa memperhatikan urgensi, kebutuhan, dan prioritas.

Rumusan Masalah

Perencanaan pembangunan daerah tidak terpisah dengan arah pembangunan nasional. Demikian juga, pemerintah provinsi harus memperhatikan arah pembangunan kabupaten dan kota. Perencanaan pembangunan harus disusun dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

Karena itu, kinerja Musrenbang perlu dievaluasi, terutama terkait keselarasan berbagai indikator pencapaian kinerja. Kajian ini mengevaluasi hasil Musrenbang Provinsi Lampung 2017 kaitannya dengan indikator pencapaian pemerintah pusat. Pertanyaan penelitian (*research question*) yang dirumuskan: “Bagaimana efektivitas Musrenbang Provinsi Lampung 2017 berkaitan kesesuaian program pembangunan pemerintah pusat?”

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interaktif melalui diskusi terfokus (FGD) dan noninteraktif

(*noninteractive inquiry*) atau disebut juga penelitian analitis melalui pengkajian berdasarkan analisis dokumen.

Pendekatan intraktif dilakukan melalui *focus group discuss* (FGD) untuk menggali pendapat peserta diskusi tentang kondisi perencanaan dan penyusunan APBD di Provinsi Lampung. Pendekatan *noninteractive inquiry* yang dilakukan adalah menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, serta mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati (Masyuri dan Zainuddin, M).

Penelitian ini difokuskan pada proses dan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2017, dengan menganalisis dan mengonfirmasi data-data terkait penyusunan APBD Provinsi Lampung 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. TINJAUAN KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

A. Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2015 – 2019

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dijelaskan Visi Pembangunan Nasional adalah: “*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong*”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui tujuh misi, yaitu:

- a) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

- b) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- e) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Agenda Prioritas Nasional (Nawacita)

Prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Sasaran Pokok RPJMN Tahun 2015 – 2019

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Arah Kebijakan Umum RPJMN Tahun 2015 – 2019

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam, dan Penanganan Perubahan Iklim.
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Rencana kerja pemerintah (RKP) 2017 juga telah menetapkan sasaran indikator

makro, yang terkait pembangunan daerah, yaitu:

Tabel Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

SASARAN RKP 2017	INDIKATOR	2017
SASARAN MAKRO	- Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5 - 5,9
	- Pengangguran (%)	5,3 - 5,6
	- Tingkat Kemiskinan (%)	9,5 - 10,5
	- Indeks Pembangunan Manusia	75,7
	- Indeks Gini	0,38

B. Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Lampung 2015 – 2019

Sejalan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan arah pembangunan Provinsi Lampung 2015-2019 dengan Visi Pembangunan: *“Lampung Maju dan Sejahtera.”*

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung menjadi daerah yang maju dan berdaya saing. Maju mempunyai konotasi *modern* atau *industrialized*. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum). Perekonomian yang maju umumnya berbasis industri, perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang mantap dan memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, disusun 5 (lima) misi dan agenda kerja sebagai berikut:

1) Misi-1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung, yang diimbangi pula dengan pemerataan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Penciptaan daya saing berkelanjutan merupakan perkuatan ekonomi sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi. Produktivitas barang dan jasa dengan kualitas tinggi dan berdaya saing akan meningkatkan nilai tambah produk dan penguatan kemandirian daerah yang diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Dampak akhir dari pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan sosial yang

berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tabel berikut:

Urusan pemerintahan yang terkait dengan misi 1 antara lain: urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, urusan kehutanan, urusan perindustrian, urusan perdagangan, urusan ketahanan pangan, urusan koperasi dan umkm, urusan penanaman modal dan perijinan, serta urusan pariwisata.

2) Misi-2: Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial

Misi ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi darat, air, sungai, udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan misi 2 antara lain: urusan pekerjaan umum, urusan perhubungan, urusan penataan ruang, urusan perumahan, urusan energi dan sumberdaya mineral, serta urusan ketransmigrasian.

3) Misi-3: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya

masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama

Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang. Pengembangan SDM berkualitas didukung dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas jasmani (keolahragaan), kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk dan transmigrasi. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas akan mampu menguasai IPTEK, diperkuat ciri yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi golongan masyarakat yang kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung oleh pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai.

Peningkatan kualitas budaya masyarakat Lampung yang direaktualisasi, direvitalisasi, dan ditransformasi, melalui redefinisi 5 (lima) prinsip kehidupan masyarakat Lampung, yaitu: 1. Pi'il pesengiri; 2. Sakai Sambayan; 3. Nemui Nyimah; 4. Nengah Nyappur; dan 5. Bejuluk Beadek. Redefinisi prinsip kehidupan Lampung menitikberatkan pada pemaknaan budaya yang konstruktif, transformatif, kreatif, dan produktif serta bernilai sosial dan ekonomi yang tinggi. Sebagai upaya menopang masyarakat berbudaya, perlu dibina masyarakat yang agamis (beriman, bertaqwa, toleran, dan berbudi pekerti luhur).

Urusan pemerintahan yang terkait dengan misi 3 antara lain: urusan pendidikan, urusan perpustakaan, urusan kesehatan, urusan kebudayaan, urusan sosial, urusan ketenagakerjaan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, urusan kepemudaan dan olahraga, dan urusan agama.

4) Misi-4: Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Selain itu juga diupayakan memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, sosial, dan wilayah pemukiman.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan misi 4 antara lain: urusan lingkungan hidup, urusan energi sumberdaya mineral, dan urusan kehutanan.

5) Misi-5: Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum,

dan menegakkan hukum serta memberantas KKN. Juga upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan dengan berorientasi pada pelayanan publik prima.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi ke-5 antara lain: urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, urusan pertanahan, urusan perencanaan pembangunan, urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, urusan kearsipan, urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2017

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah dan sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2017 di arahkan pada:

Tabel Sasaran Makro RKPD Provinsi Lampung Tahun 2017

SASARAN MAKRO	INDIKATOR	2017
SASARAN MAKRO 2017	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5 – 5,9
	Inflasi (%)	4 +/- 1
	Pengangguran Terbuka	4,01
	Kemiskinan (%)	12,32
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,37 *)
	Indeks Gini	0,32
	PDRB per kapita ADHB (juta rupiah)	35,82
	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,3
	Pertumbuhan PAD (%)	3,1
	Kemantapan Jalan Provinsi (%)	75

*) Metode Baru

Sejalan dengan RKP 2017 yang mengarahkan prioritas pembangunan nasional pada program kedaulatan pangan, maritim, industri, pemerataan pembangunan, serta pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2017 yang bertema: “*Memperkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Ekonomi untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilyah Menuju Lampung Maju dan Sejahtera*” melalui 8 (delapan) jalur prioritas pembangunan, yaitu:

Pertama Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;

Kedua Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan;

Ketiga Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi kemiskinan;

Keempat Pengembangan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;

Kelima Mengembangkan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM;

Keenam Melanjutkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;

Ketujuh Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;

Kedelapan Meningkatkan kelestarian sumber daya alam dan kesiagaan penanggulangan bencana.

Delapan prioritas pembangunan tahun 2017 tersebut, diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan yang selaras dengan 5 (lima) misi pembangunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

II. KESELARASAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

Keselarasan Tema Pembangunan

Strategi pembangunan nasional memiliki tiga pokok dimensi pembangunan yang terdiri dari dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut ditopang oleh kepastian dan penegakan sektor hukum, kemandirian dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan strategi pembangunan nasional, maka pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya dengan tema

pembangunan yang berbeda setiap tahunnya. Kondisi ini perlu diikuti oleh pemerintah daerah sebagai katalisator kebijakan sehingga terjadi keselarasan pembangunan.

Tabel Tema Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2017

Tema Pembangunan Nasional 2017	Tema Pembangunan Provinsi Lampung 2017
<i>Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah</i>	<i>Memperkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Ekonomi untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilyah Menuju Lampung Maju dan Sejahtera</i>

Berdasarkan tabel diatas, terlihat perbedaan penekanan tema pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Meski, keduanya menitikberatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi sebagai katalisator peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah. Hal lain yang dapat disimpulkan dari tema pembangunan pusat dan daerah tersebut, antara lain :

1. Tema nasional fokus pada infrastruktur dan ekonomi. Pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Pola pemerataan pembangunan juga dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.
2. Tema pembangunan Provinsi Lampung mencakup tema nasional, tetapi menitikberatkan pada pelayanan publik. Tema pembangunan Lampung 2017 diarahkan mencapai visi RPJMD Provinsi Lampung. Tema

pembangunan nasional dapat diselaraskan dengan pencapaian RPJMD.

Keselarasan Program Prioritas Pembangunan

Pembangunan di Indonesia dilakukan secara terstruktur, terarah, dan terintegrasi. Setiap tahun ditentukan skala prioritas yang selaras dengan tema pembangunan dan rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Program prioritas nasional ditentukan berdasarkan RPJMN dengan penekanan pembangunan setiap tahunnya. Program prioritas nasional meliputi dimensi pembangunan manusia, sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan, serta dimensi perlu.

Dari tinjauan keselarasan prioritas nasional dan Provinsi Lampung, disimpulkan bahwa program prioritas Provinsi Lampung telah mencakup semua dimensi program prioritas nasional. Namun, tidak semua subdimensi pembangunan nasional menjadi prioritas di Provinsi Lampung. Disamping tingkat kepentingan, keterbatasan fiskal juga membuat tidak semua subdimensi pembangunan nasional bisa menjadi prioritas di provinsi. Meski demikian, beberapa subdimensi prioritas pembangunan nasional telah dilaksanakan secara rutin dalam kegiatan pemerintah Provinsi Lampung.

Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah

Pembangunan nasional memiliki berbagai indikator pencapaian sasaran pada setiap dimensinya. Indikator disusun berdasarkan target pencapaian RPJMN dan isu strategis yang berkembang saat ini. Penetapan indikator sasaran nasional diharapkan didukung pemerintah daerah. Karena itu, pembangunan daerah hendaknya mengacu pada indikator pencapaian pembangunan

nasional sesuai kewenangan daerah. Pola ini disebut pembangunan terintegrasi, dimana terjadi konektivitas antarlembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah. Indikator masing-masing sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Dimensi Pembangunan Manusia

Dimensi pembangunan manusia memiliki cakupan yang cukup penting karena meliputi beberapa subdimensi seperti revolusi mental, pembangunan pendidikan, kesehatan, serta perumahan dan permukiman.

Berdasarkan perbandingan indikator sasaran nasional dan provinsi, dapat diketahui jumlah indikator sasaran nasional yang berkaitan dengan daerah mencapai 40 indikator sasaran. Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan indikator tersebut dalam berbagai program dan kegiatan pada 2017. Adapun tingkat kecakupan dukungan pencapaian indikator sasaran nasional yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung mencapai 33 indikator sasaran atau 82,5%.

Beberapa indikator sasaran yang belum direspon dengan baik oleh pemerintah daerah, antara lain:

1. Peningkatan semangat persaingan yang sehat (*cooperate and compete*).
Pemerintah Provinsi Lampung belum merespon dengan baik peningkatan semangat persaingan yang sehat dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa. Semangat persaingan yang sehat dapat dilakukan dengan menegakkan berbagai aturan yang mendukung usaha baik barang maupun jasa. Pada sisi lain, pembinaan mental pelaku usaha perlu dipersiapkan guna menghadapi persaingan usaha tidak hanya dalam satu provinsi, tetapi juga sudah antarnegara.
2. Persentase ruang publik bermuatan negatif (penyebarkan kebencian, radikalisme dan pornografi).
Isu strategis yang berkembang saat ini terkait ruang publik bermuatan negatif, terutama berkaitan dengan berkembangnya wacana Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Upaya pencegahan disintegrasi bangsa menjadi hal penting yang harus dilakukan pada 2017 ini terkait hal tersebut. Apalagi menghadapi tahun politik 2018–2019. Salah satunya adalah dengan meminimalisir ruang–ruang publik yang acap menjadi tempat penyebaran kebencian, radikalisme, dan pornografi. Pemerintah Provinsi Lampung belum merespon dan mengakomodasi dalam indikator sasaran tersebut. Upaya pengawasan ruang publik yang berpotensi sebagai tempat penyebaran konten-konten negatif menjadi kewajiban pemerintah daerah yang dapat bekerja sama dengan masyarakat.
3. Meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme.
Berbagai ancaman radikalisme dan terorisme belakangan ini meningkat di Indonesia dan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Indikator sasaran prioritas nasional 2017 menjadikan radikalisme dan terorisme menyebut perlu ditanggulangi agar menciptakan suasana yang kondusif. Pemerintah Provinsi Lampung belum memiliki program dan kegiatan secara kongkrit dalam upaya meningkatkan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme. Upaya pencegahan dengan model antiradikalisme dan antiterorisme melalui sosialisasi dan pengenalan wilayah berpotensi radikal dan teror menjadi hal utama yang seharusnya dilakukan oleh semua Pemerintah Daerah.

4. Persentase SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B.

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan akreditasi penyelenggara pendidikan baik pada tingkat dasar maupun menengah atas. Akreditasi merupakan salah satu alat untuk mengukur kualitas dan kepatuhan penyelenggara pendidikan terhadap berbagai ketentuan/kriteria penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Lampung belum memiliki skala prioritas dalam peningkatan akreditasi penyelenggara pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah baru pada pembenahan infrastruktur dan sumber daya manusia secara umum.

Akreditasi juga meliputi berbagai proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga pola peningkatan kualitas pendidikan masih belum komprehensif dan bersifat spasial. Dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada pemerintah provinsi, seyogianya akreditasi satuan pendidikan dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan ini mendapat perhatian lebih khususnya pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota sudah waktunya memperhatikan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar melalui sistem akreditasi satuan pendidikan ini.

B. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Dimensi pembangunan sektor unggulan menitikberatkan pada kedaulatan pangan, energi, dan pembangunan kemaritiman/kelautan, dan pariwisata. Upaya melepaskan ketergantungan impor pangan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah menjadikan pembangunan sektor unggulan

sebagai tulang punggung pembangunan kemandirian ekonomi bangsa.

Diketahui bahwa jumlah indikator sasaran pembangunan nasional sektor unggulan yang berkaitan dengan pembangunan Provinsi Lampung mencapai 16 indikator sasaran. Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan indikator tersebut dalam berbagai program dan kegiatan pada 2017. Adapun tingkat kecakupan dukungan indikator pencapaian indikator sasaran nasional yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung mencapai 16 indikator sasaran atau mencapai 100%.

C. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

Sasaran pembangunan nasional pada dimensi pemerataan dan kewilayahan ditekankan pada penyiapan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global serta mengurangi ketimpangan pembangunan di Indonesia.

Diketahui bahwa jumlah indikator sasaran pembangunan nasional sektor pemerataan dan kewilayahan yang berkaitan dengan pembangunan Provinsi Lampung mencapai 22 indikator sasaran. Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan indikator tersebut dalam berbagai program dan kegiatan pada 2017. Adapun tingkat kecakupan dukungan indikator pencapaian indikator sasaran nasional yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung mencapai 20 indikator sasaran dari 22 indikator sasaran yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi atau mencapai 90,91%.

Beberapa indikator sasaran yang belum direspon dengan baik oleh pemerintah daerah, antara lain:

1. Pengembangan BRT (kota besar)
Perkembangan transportasi di kota besar semakin pesat seiring dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap kendaraan. Moda

transportasi yang semakin meningkat mengakibatkan kemacetan yang berujung pada penambahan biaya transportasi masyarakat. Pembangunan moda transportasi massal di kota besar selama ini muncul sebagai upaya mengatasi kemacetan yang terjadi. Dengan antisipasi sejak dini, diharapkan kesadaran masyarakat akan segera terbentuk untuk menggunakan moda transportasi massal tersebut.

2. Peningkatan Desa Mandiri

Fokus pengentasan kemiskinan selama ini berpusat pada pengembangan desa tertinggal menjadi desa berkembang. Padahal, untuk menciptakan perekonomian masyarakat yang mandiri, diperlukan peningkatan status desa tertinggal dan berkembang menjadi mandiri. Desa mandiri menjadikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang tidak memiliki ketergantungan terhadap pemerintah.

Optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh desa dapat menjadikan katalisator peningkatan status desa menjadi mandiri. Pemerintah Provinsi Lampung masih fokus pada pengentasan desa tertinggal, dan belum optimal dalam mengembangkan desa mandiri. Pelaksanaan yang spasial dan tidak terintegrasi menjadikan perwujudan desa mandiri di Provinsi Lampung menjadi berjalan lambat. Upaya tersebut dapat dimulai dengan pemetaan potensi desa mandiri dan fasilitasi pembentukan desa mandiri.

3. Jaringan tulang punggung serat optik nasional di ibukota kabupaten/kota.

Teknologi informasi dan komunikasi membawa konsekuensi terhadap kewajiban penyediaan infrastruktur yang memadai. Upaya pembangunan serat optik nasional diyakini dapat membantu akselerasi penetrasi teknologi informasi di seluruh wilayah Indonesia.

Fokus pembangunan nasional ini harus ditangkap dengan cepat oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini belum memprioritaskan pembangunan masyarakat yang sadar akan teknologi informasi dan komunikasi. Upaya tersebut dapat diawali dengan melakukan rekayasa dan edukasi perilaku masyarakat yang memiliki kepentingan dengan pemerintah daerah, hingga ketersediaan *roadmap* pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah.

D. Dimensi Pembangunan Polhukhankam

Dimensi pembangunan politik, hukum, pertanahan, dan keamanan lebih banyak diarahkan pada upaya negara dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan kehidupan bernegara, serta menjamin pelaksana pemerintahan yang transparan. Ada beberapa indikator sasaran yang berkaitan dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan perbandingan keselarasan indikator pembangunan Polhukhankam dapat diketahui bahwa jumlah indikator sasaran pembangunan nasional sektor Polhukhankam yang berkaitan dengan pembangunan daerah ada 10 indikator sasaran. Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan indikator tersebut dalam berbagai program dan kegiatan pada 2017. Adapun tingkat kecakupan dukungan indikator pencapaian sasaran nasional yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung mencapai 10 indikator sasaran atau 100%.

Efektivitas Pencapaian Sasaran Program Prioritas Pembangunan

Seluruh indikator sasaran dimensi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 mampu diserap melalui pelaksanaan

Musrenbang Provinsi Lampung. Dari 89 indikator sasaran pembangunan nasional yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terdapat 79 indikator yang berhasil diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Lampung dari 88 indikator sasaran yang berkaitan dengan Provinsi Lampung, atau dengan kata lain, tingkat kesesuaian program sebesar 88,76%.

Menurut Skala Nilai Peringkat Kinerja dari Kementerian Dalam Negeri, nilai 88,76% termasuk rentang penilaian $76\% \leq 90\%$ atau dalam kriteria penilaian realisasi kinerja berkategori TINGGI.

KESIMPULAN

Simpulan

1. Pelaksanaan Musrenbang merupakan langkah awal proses pembagunan Nasional yang diharapkan dapat melahirkan keselarasan tema, arah kebijakan, serta prioritas program, sehingga proses pembangunan pusat dan daerah dapat berjalan secara terintegrasi dan terarah.
2. Tema pembangunan nasional pada 2017 menitikberatkan percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah. Prioritas nasional tahun 2017 meliputi empat dimensi, yaitu pembangunan manusia, sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan, serta politik hukum pertahanan dan keamanan (Polhukhankam). Prioritas pembangunan tersebut dapat diselaraskan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah.
3. Indikator sasaran pembangunan nasional yang didukung oleh pemerintah Provinsi Lampung mencapai 79 indikator dari 88 indikator sasaran pembangunan nasional, atau

88,76%, yang berada dalam rentang kriteria penilaian kinerja berkategori tinggi.

Saran

1. Penetapan prioritas pembangunan nasional oleh daerah harus memperhatikan aspek kemampuan, kepentingan/kebutuhan, dan kewenangan daerah. Beberapa peluang pembangunan nasional dapat dijadikan dorongan bagi daerah untuk melaksanakan prioritas nasional di wilayahnya, sehingga dapat dijadikan modal untuk berkompetisi dengan daerah lain.
2. Efektivitas pelaksanaan Musrenbang dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan berbagai unsur kegiatan yang mampu menopang program prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, beberapa indikator sasaran pembangunan daerah perlu disesuaikan dengan indikator sasaran pembangunan nasional.
3. Kualitas partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang masih perlu ditingkatkan dengan melibatkan warga secara tepat dan efektif. Warga perlu diberikan informasi yang memadai sebelum dan setelah pelaksanaan Musrenbang, terkait substansi maupun arah perencanaan pembangunan setiap tahunnya

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050—187/Kep/Banda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- Ma'rif, Samsul. Prihadi Nugroho dan Lydia Wijayanti. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang. Riptek, Vol.4, No.11, Tahun 2010, Hal.: 53 – 62
- Masyuri dan Zainuddin, M. 2008. "Metodologi Penelitian : Pendekatan praktis dan aplikatif". Bandung : PT. Refika Aditama

Halaman Kosong